

## KETIMPANGAN SKEMA PENDANAAN SLB NEGERI DAN SWASTA: STUDI KOMPARATIF DI DUA SEKOLAH

Oleh:

**Sri Mulyani<sup>1</sup>**

**Indah Ayu Kusuma Ningrum<sup>2</sup>**

**Hilda Fegy Astuti<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: JL. Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah (50229).

Korespondensi Penulis: [smulyani1506@students.unnes.ac.id](mailto:smulyani1506@students.unnes.ac.id),  
[nameindahayu29@students.unnes.ac.id](mailto:nameindahayu29@students.unnes.ac.id), [hldafegy03@students.unnes.ac.id](mailto:hldafegy03@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *This research examines the inequality of funding schemes between public and private special schools in Indonesia, with a comparative study of SLB Negeri Semarang and SLB Darma Putra Kalipuncang. The background of the research refers to the unequal access to funding that affects the quality of inclusive education services, affecting the quality of inclusive education services, where public special schools depend on government funds (BOS/BOP) with strict regulations, while private SLBs utilise diverse sources of funds such as CSR, donations, and other funding sources. utilise diverse funding sources such as CSR, private donations and business units. The aim of the study was to compare the funding schemes of the two types of SLBs and their impact on the sustainability of education services. impact on the sustainability of education services. The method used method used was comparative descriptive qualitative through a multiple case study, with data collection techniques of interview, observation and data collection techniques of interview, observation, and documentation study. Results The results showed that private SLBs have high flexibility in management, access to external funding sources, and the ability to respond quickly to local needs. respond quickly to local needs. Meanwhile, public SLBs are constrained by bureaucratic regulations that limit the receipt of cash funds and hinder innovation. innovation. In conclusion, funding inequalities have the potential to widen disparities in the quality of education services. This research*

Received April 19, 2025; Revised April 30, 2025; May 04, 2025

\*Corresponding author: [smulyani1506@students.unnes.ac.id](mailto:smulyani1506@students.unnes.ac.id)

# KETIMPANGAN SKEMA PENDANAAN SLB NEGERI DAN SWASTA: STUDI KOMPARATIF DI DUA SEKOLAH

*emphasises the importance of policy reform policy reforms to increase the autonomy of public special schools in managing funding accountably, as well as the need for transparency in private SLBs. These findings form the recommendations for equalising opportunities to improve the quality of inclusive education in Indonesia. inclusive education in Indonesia*

**Keywords:** *Special School Funding, Comparative Study, Education Policy.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji ketimpangan skema pendanaan antara Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri dan swasta di Indonesia, dengan studi komparatif di SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipuncang. Latar belakang penelitian merujuk pada ketidaksetaraan akses pendanaan yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan inklusif, di mana SLB negeri bergantung pada dana pemerintah (BOS/BOP) dengan regulasi ketat, sedangkan SLB swasta memanfaatkan sumber dana beragam seperti CSR, sumbangan swasta, dan unit usaha. Tujuan penelitian adalah membandingkan skema pendanaan kedua jenis SLB serta dampaknya terhadap keberlangsungan layanan pendidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif komparatif melalui studi kasus ganda, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan SLB swasta memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan dana, akses terhadap sumber pendanaan eksternal, dan kemampuan merespons kebutuhan lokal secara cepat. Sementara itu, SLB negeri terkendala regulasi birokratis yang membatasi penerimaan dana tunai dan menghambat inovasi. Kesimpulannya, ketimpangan pendanaan berpotensi memperlebar disparitas kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan untuk meningkatkan otonomi SLB negeri dalam mengelola pendanaan secara akuntabel, serta perlunya transparansi di SLB swasta. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi bagi pemerataan kesempatan peningkatan mutu pendidikan inklusif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendanaan SLB, Studi Komparatif, Kebijakan Pendidikan.

## LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam implementasinya, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara merata dan inklusif, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus

yang memperoleh layanan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua SLB memiliki akses pendanaan yang setara untuk menunjang kualitas layanan pendidikan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah perbedaan sumber dan skema pendanaan antara SLB negeri dan swasta.

SLB negeri cenderung hanya mengandalkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BOP), yang penggunaannya telah diatur ketat dalam regulasi pemerintah. Berdasarkan wawancara penulis dengan bendahara SLB Negeri Semarang, sekolah tidak diperkenankan menerima bantuan tunai dari pihak swasta maupun melakukan pungutan kepada peserta didik, meskipun bantuan non-tunai masih dimungkinkan. Ketentuan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 yang menekankan pelarangan pungutan dan pembatasan penerimaan dana dari pihak ketiga secara langsung (Permendikbud RI 2016, 2022).

Berbeda dengan SLB swasta, seperti yang diteliti oleh Mukti, Dhiaulhaq, dan Jamiludin (2024), pendanaan tidak hanya berasal dari BOS, tetapi juga mencakup sumbangan dari lembaga swasta dan NGO, partisipasi masyarakat, hasil unit usaha sekolah, serta dana CSR dari perusahaan. Diversifikasi sumber dana tersebut terbukti memberi keleluasaan dalam pengembangan sarana, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kata lain, perbedaan struktur kelembagaan memengaruhi aksesibilitas terhadap sumber daya finansial pendidikan.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan (Fatonah 2021; Hafni and Rahmawati 2022). Penelitian oleh Yuaniarti (2020) menyebutkan bahwa unit usaha sekolah di SLB dapat menjadi alternatif pendanaan yang produktif. Namun, potensi ini sulit diimplementasikan di SLB negeri karena keterbatasan regulasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, terutama dalam konteks pendidikan khusus yang membutuhkan pendanaan lebih besar untuk penyediaan fasilitas dan layanan individual siswa.

Literatur dalam lima tahun terakhir juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan (Muspawi 2020; Nurhadi 2020). Sayangnya, sistem pembiayaan di SLB negeri yang cenderung tunggal dan birokratis membuat proses perencanaan dan pemanfaatan anggaran menjadi kurang fleksibel.

## **KETIMPANGAN SKEMA PENDANAAN SLB NEGERI DAN SWASTA: STUDI KOMPARATIF DI DUA SEKOLAH**

Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang keadilan fiskal dalam pendidikan inklusif di Indonesia, serta urgensi reformasi kebijakan pendanaan agar semua SLB memiliki kesempatan yang setara dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan skema pendanaan antara SLB negeri dan swasta serta mengidentifikasi dampaknya terhadap keberlangsungan layanan pendidikan. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik dalam pengelolaan pendanaan SLB yang adil dan berkelanjutan.

### **KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan *School-Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS), yang merupakan salah satu reformasi pendidikan yang menekankan pada peningkatan otonomi dan partisipasi sekolah dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, termasuk dalam aspek keuangan (Suparlan 2022). Pada kerangka teori ini, semakin besar kewenangan dan kemandirian yang dimiliki sekolah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya, maka semakin tinggi potensi sekolah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pendidikan (Caldwell, B. J., & Spinks 2022). Otonomi yang tinggi ini memungkinkan sekolah untuk mengalokasikan anggaran sesuai prioritas lokal, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan terhadap hasil pendidikan.

Dalam konteks SLB, penerapan prinsip MBS sangat penting mengingat kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang beragam dan memerlukan pendekatan yang fleksibel serta responsif. SLB swasta cenderung memiliki keleluasaan yang lebih tinggi dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar seperti perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau komunitas, yang memungkinkan adanya diversifikasi pendanaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), donasi, atau unit usaha sekolah (Nurhadi 2020). Hal ini berbanding terbalik dengan SLB negeri, yang berdasarkan regulasi pemerintah seperti (Permendikbud RI 2022) hanya diperbolehkan menerima dana BOS dan BOP, serta dibatasi dalam menerima bantuan tunai dari pihak swasta.

Ketimpangan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan inilah yang menjadi perhatian dalam teori ini. Dengan keterbatasan sumber dana dan rendahnya fleksibilitas pengelolaan, SLB negeri menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas secara optimal. Sebaliknya, SLB swasta yang lebih mandiri secara keuangan lebih mampu menyesuaikan kebijakan dan strategi dengan kebutuhan peserta didiknya secara langsung. Maka dari itu, teori Manajemen Berbasis Sekolah memberikan dasar konseptual dalam menganalisis bagaimana perbedaan skema pendanaan antara SLB negeri dan swasta.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif. (Sugeng 2020). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang potensi besar dalam pengembangan industri di Indonesia melalui analisis literatur yang relevan yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan skema pendanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus ganda, dimana melakukan perbandingan dua sekolah luar biasa sebagai objek studi. Adapun aspek yang dibandingkan dalam penelitian ini meliputi: (1) sumber dana, (2) fleksibilitas penggunaan dana, (3) regulasi dan pembatasan pendanaan, (4) birokrasi pengelolaan, (5) dampak pada mutu pelayanan pendidikan, serta (6) akses terhadap bantuan tambahan dari pihak luar. Aspek-aspek tersebut dianalisis berdasarkan data primer dari SLB Negeri Semarang dan data sekunder dari SLB Darma Putra Kalipucang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dari laporan. Data yang diterima dari hasil wawancara akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, lalu dibentuk kesimpulan dalam bentuk narasi dan tabel perbandingan. Untuk memastikan validitas data digunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumen.

# KETIMPANGAN SKEMA PENDANAAN SLB NEGERI DAN SWASTA: STUDI KOMPARATIF DI DUA SEKOLAH



**Gambar 1.** *Flowchart Metode Penelitian.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumber Pendanaan

Hasil observasi dan perbandingan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam sumber pendanaan antara SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipuncang, kedua sekolah sama-sama menerima BOS dari pemerintah. Namun, dalam aspek pendanaan lainnya SLB Negeri Semarang menunjukkan keterbatasan dibandingkan SLB swasta Kalipuncang.

SLB Negeri Semarang hanya menerima pendanaan dari BOS sebagai sumber utama dan kerja sama eksternal (CSR). Namun, bentuk CSR yang diterima tidak berupa uang tunai, melainkan berupa bantuan non-finansial seperti alat bantu pembelajaran, pelatihan, atau peningkatan sarana dan prasarana sekolah. SLB Negeri Semarang tidak menerima sumbangan dari lembaga swasta, tidak menerima sumbangan dan tidak menjadikan unit usaha sebagai sumber pendanaan. Meskipun sekolah ini memiliki unit

usaha Difamart yang dikelola, usaha tersebut tidak menyumbang langsung kepada pendanaan sekolah karena dana yang dihasilkan hanya digunakan dalam lingkup unit usaha itu sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan SLB Negeri Semarang dalam menerima pembiayaan tambahan di luar dana BOS.

Sebaliknya, SLB Darma Putra Kalipuncang memiliki sumber dana yang lebih beragam, dari pihak eksternal dan internal. Dari pihak eksternal sekolah ini menerima sumber dana seperti sumbangan lembaga swasta, menerima hibah, serta menjalin kerja sama eksternal (CSR) baik dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Dari pihak internal, sumber pendanaan berasal dari kegiatan usaha sekolah. SLB Darma Putra Kalipuncang, menjalankan unit usaha seperti koperasi sekolah, kantin, atau bahkan hasil kerajinan tangan siswa yang dijual untuk umum. Dana dari kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan secara fleksibel untuk mendukung kebutuhan operasional maupun pengembangan sekolah. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam mendukung operasional, pengembangan fasilitas, serta pelaksanaan program-program di sekolah.

Perbandingan ini menyoroti perbedaan sumber pendanaan antara SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipuncang. SLB Darma Putra Kalipuncang memiliki keleluasaan dalam menerima dana tambahan, sedangkan sekolah negeri terikat pada peraturan yang membatasi terkait sumber pendanaan eksternal.

### **Fleksibilitas**

Dalam pengelolaan dana pendidikan merujuk pada kemampuan dan kewenangan satuan pendidikan atau institusi pendidikan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan menggunakan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Fleksibilitas dalam penelitian ini diukur melalui partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan kebebasan dalam menetapkan prioritas.

Berdasarkan informasi yang diterima dan dikumpulkan peneliti, SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipuncang dalam perencanaan pengelola keuangan mengambil langkah awal dengan melakukan pengadaan pertemuan dengan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk membahas kebutuhan dan tujuan periode tertentu. Misalnya pembahasan berkaitan dengan jangka pendek, menengah dan panjang. SLB Drama Putra Kalipuncang memiliki otonomi keuangannya sendiri untuk

## **KETIMPANGAN SKEMA PENDANAAN SLB NEGERI DAN SWASTA: STUDI KOMPARATIF DI DUA SEKOLAH**

menggunakan dana tersebut tanpa terikat secara langsung oleh pemerintah. Pihak sekolah dapat menentukan dana tersebut akan digunakan untuk apa dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah.

SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipucang menetapkan prioritas anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia guru dan media proses pembelajar untuk meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Dalam perencanaan sebelumnya SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipucang sudah melakukan penyusunan dan menetapkan prioritas untuk satu tahun. Tetapi jika dalam pelaksanaannya ada suatu hal atau kejadian yang tidak bisa dihindari maka SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipucang akan memprioritaskan pembiaayaan untuk kejadian tersebut. Jadi prioritas yang direncanakan tetap dijalani sesuai dengan kondisi sekolah saat pelaksanaan.

### **Larangan dan Regulasi**

Hasil wawancara dengan bendahara SLB Negeri Semarang mengungkapkan bahwa sekolah ini dibatasi oleh regulasi pemerintah dalam menerima bantuan dari pihak luar, khususnya dalam bentuk tunai. Sekolah hanya diperbolehkan menerima bantuan non-tunai, seperti barang penunjang sarana dan prasarana sekolah atau layanan seperti tes kesehatan. Pembatasan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2012), yang melarang satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali mereka.

Di sisi lain, SLB Darma Putra Kalipucang, sebagai sekolah swasta, memiliki fleksibilitas lebih dalam menerima bantuan dari pihak luar, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Sekolah ini dapat menerima sumbangan dari orang tua peserta didik, lembaga swasta, atau donatur lainnya tanpa pembatasan yang ketat seperti yang berlaku di sekolah negeri. Hal ini memungkinkan SLB swasta untuk mengembangkan program-program tambahan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Perbedaan regulasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam skema pendanaan antara SLB negeri dan swasta. SLB negeri terikat oleh regulasi yang ketat dalam hal penerimaan bantuan dan pungutan, sementara SLB swasta memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola dan menerima dana dari berbagai sumber. Ketimpangan ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan yang dapat diberikan oleh masing-masing jenis sekolah.

### **Prosedur dan Birokrasi Pengelolaan Dana**

Dalam hal prosedur pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan, baik SLB Negeri Semarang maupun SLB Swasta Darma Putra Kalipucang sama-sama menerapkan proses yang sistematis dan terstruktur. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keluwesan birokrasi antara keduanya. SLB Negeri Semarang menunjukkan keterikatan terhadap regulasi birokrasi yang ketat, yang menyebabkan proses pengelolaan dana cenderung lebih kaku dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mengikuti prosedur sesuai aturan pemerintah.

Sebaliknya, SLB Swasta Darma Putra Kalipucang memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam hal birokrasi. Meskipun tetap mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekolah swasta cenderung lebih fleksibel dalam pengelolaan dana, terutama dalam aspek penggunaan bantuan dari pihak luar dan penyusunan prioritas anggaran. Hal ini memungkinkan mereka merespons kebutuhan sekolah secara lebih cepat dan efisien.

Perbedaan dalam fleksibilitas birokrasi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program-program pendidikan dan pemanfaatan dana tambahan di sekolah. Sekolah swasta lebih mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, sementara sekolah negeri kerap terkendala pada aspek administrasi dan pengawasan yang kompleks. Kondisi ini memperlihatkan perlunya kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas manajerial sekolah negeri agar tidak tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan khusus yang dinamis dan beragam.

### **Aksesibilitas terhadap Dana Tambahan**

Salah satu hal yang menjadi tantangan sekaligus pembeda nyata antara SLB Negeri Semarang dan SLB Swasta Darma Putra Kalipucang adalah dalam hal akses terhadap dana tambahan. Dari hasil temuan di lapangan, sekolah negeri tampaknya

## **KETIMPANGAN SKEMA PENDANAAN SLB NEGERI DAN SWASTA: STUDI KOMPARATIF DI DUA SEKOLAH**

memiliki keterbatasan dalam hal ini. Mereka tidak memiliki keleluasaan untuk secara aktif mencari atau menerima bantuan tambahan di luar dana pemerintah. Hal ini disebabkan oleh regulasi dan mekanisme birokrasi yang cukup ketat, sehingga pihak sekolah harus sangat berhati-hati dalam menjalin kerja sama atau menerima bantuan dari pihak luar. Akibatnya, peluang untuk mendapatkan dukungan finansial non-pemerintah menjadi sangat terbatas, dan sekolah lebih bergantung pada anggaran resmi yang tersedia.

Sebaliknya, SLB Swasta Darma Putra Kalipucang menunjukkan karakteristik yang lebih adaptif dan terbuka. Sekolah ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalin kemitraan dan menerima bantuan tambahan, baik dari lembaga swasta, CSR perusahaan, maupun donatur individu. Keleluasaan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi sekolah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam pembiayaan program-program yang tidak tercakup dalam anggaran utama. Fleksibilitas tersebut tentu menjadi nilai tambah yang signifikan, karena memungkinkan pengembangan program inovatif yang berbasis pada kebutuhan siswa secara langsung.

**Tabel. 1**

Perbandingan Sumber dan Mekanisme Pendanaan antara SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipucang

<b>Aspek</b>	<b>SLB Negeri Semarang</b>	<b>SLB Darma Putra Kalipucang</b>
<b>Sumber Pendanaan</b>		
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Menerima	Menerima
Sumbangan dari lembaga swasta	Tidak Menerima	Menerima
Pendapatan dari unit usaha sekolah	Tidak Menerima	Menerima
Hibah	Tidak Menerima	Menerima
Kerja sama eksternal (CSR)	Menerima	Menerima
<b>Fleksibilitas</b>		

Perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan pertemuan dengan seluruh tenaga pendidik	Ya	Ya
Memiliki kebebasan dalam menetapkan prioritas anggaran	Ya	Ya
<b>Larangan &amp; Regulasi</b>		
Pembatasan penerimaan bantuan dari pihak luar (tunai vs non-tunai)	Ya ada pembatasan untuk tunai	Tidak ada pembatasan
Regulasi pungutan atau kontribusi orang tua	Ya	Tidak
<b>Prosedur dan Birokrasi Pengelolaan Dana</b>		
Proses pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban	Ya	Ya
Keleluasaan dalam terkait birokrasi	Tidak	Ya
<b>Aksesibilitas terhadap Dana Tambahan</b>		
Keleluasaan dalam mencari bantuan tambahan	Tidak	Ya

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Ketimpangan pendanaan antara SLB Negeri Semarang dan SLB Darma Putra Kalipuncang. SLB Negeri bergantung pada BOS dan bantuan non-tunai CSR dengan regulasi ketat, sementara SLB swasta lebih fleksibel dengan sumber dana beragam, termasuk sumbangan tunai dan unit usaha. Fleksibilitas ini memberi ruang lebih bagi sekolah swasta dalam pengembangan program dan respons terhadap kebutuhan pendidikan.

Secara teoritis, hasil ini menguatkan pentingnya otonomi pendidikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Keterbatasan regulasi pada sekolah negeri menjadi tantangan nyata yang dapat menghambat inovasi pendidikan.

# KETIMPANGAN SKEMA PENDANAAN SLB NEGERI DAN SWASTA: STUDI KOMPARATIF DI DUA SEKOLAH

Disarankan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan pendanaan SLB negeri untuk memberi ruang lebih bagi kemitraan yang akuntabel. SLB swasta diimbau terus memperkuat transparansi dana. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek dan mengkaji dampak ketimpangan pendanaan terhadap kualitas pendidikan secara lebih mendalam.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada SLB Negeri Semarang yang telah berkenan menjadi objek penelitian, serta kami ucapkan terimakasih kepada penulis artikel jurnal Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SLB Darma Putra Kalipucang yang menjadi sumber referensi utama kami dalam menulis artikel ini

## DAFTAR REFERENSI

- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. 2022. *Raising the Stakes: From Improvement to Transformation in the Reform of Schools*.
- Fatonah, Nurul. 2021. "Manfaat Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Mutu Proses Pembelajaran." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 15(2):474. doi: 10.52434/jp.v15i2.1382.
- Hafni, Diska Arliena, and Fitri Maulidah Rahmawati. 2022. "Pengelolaan Keuangan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19." *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 5(2):93–104. doi: 10.17977/um027v5i22022p93.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2012. *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR*.
- Mukti, Ajeng Tanjiah Setia, Fauzan Dhiaulhaq, and Jamiludin. 2024. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di SLB Darma Putra Kalipucang." 2(2):195–203. doi: 10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i2.577.
- Muspawi, Mohamad. 2020. "Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(2):402. doi: 10.33087/jiubj.v20i2.938.

- Nurhadi, H. 2020. "Peran CSR Dalam Mendukung Pendidikan Di SLB." *Pustaka Pendidikan*.
- Permendikbud RI. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*. Vol. 53. Jakarta.
- Permendikbud RI. 2022. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Vol. 1342. Jakarta.
- Pranoto, Y. D. 2021. "Analisis Kebijakan Pungutan Sekolah Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 13(2):124–35.
- Sugeng, Bambang. 2020. *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Suparlan. 2022. *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai Dengan Praktik*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Yuaniarti, R. 2020. "Pendanaan Pendidikan Di SLB Melalui Unit Usaha Sekolah." *Universitas Negeri Malang*.